

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdoellah, Priyatmanto. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Abdullah, Rozali. 1999. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.
- Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basah. Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman, Arief. 1996. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- H.R, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Zairin. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 1993. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Hadjon Philipus, dkk. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Hadjon, Philipus. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- _____. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marbun, S.F. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet.7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo Soedikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pudyatmoko Y. Sri dan W. Riawan Tjandra. 1996. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1985. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Cetakan ke-IV*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Setiadi, Wicipto. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Perbandingan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Tjandra, W.Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Triwulan T Titik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Volly, Willy D.S. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Edisi Ketiga, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-962 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 89/G/2019/PTUN.BDG.

Internet:

http://studihukum.blogspot.com/2010/11/keputusan-tata-usaha-negara-2-syarat_20.html.

